



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Senin, 18 Januari 2016 06:00

Diincar KPK, Trio “A” Malah Dapat Proyek Rp 500 Miliar

GAGAL di APBNP, Trio “A” lolos menggarap tujuh paket di APBN 2016. Nilainya lebih dari Rp 500 miliar. Itu baru di Tenggara Raya, belum Pulau Seram yang tinggal menunggu hasil tender. Mungkinkah KPK melacak?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tengah mengincar aliran dana suap yang diduga hasil pantungan pengusaha ternama di Maluku yang dikenal dengan istilah “Trio A” ini belakangan terungkap, bila ketiga pengusaha yang salah satu bernama Abdul Khoir telah ditangkap dan ditahan di Hotel Prodeo KPK, telah lolos tender tujuh paket proyek di APBN 2016, sebesar Rp 500 miliar.

Tujuh paket proyek di Balai Jalan dan Jembatan Maluku, Maluku Utara berlokasi di Maluku Tenggara Raya. Data Kabar Timur di Kantor Balai Jalan dan Jembatan Maluku menyebutkan, proyek jalan tahun 2016, khusus Maluku Tenggara Raya, dibenarkan dimenangkan tiga pengusaha itu, salah satunya Abdul Khoir dengan bendera PT Windu Tunggal Utama.

Menurut data itu, dari total Rp 500 miliar APBN 2016 untuk infrastruktur jalan di Tenggara Raya itu, berlokasi di, Serwaru, Larat, Tapa, Kisar, Wetar dan Moa. “Jadi ada, ruas-ruas jalan baru di daerah itu, seperti di Larat dan Selwaru dikerjakan trio “A” salah satunya Abdul Khoir itu,” beber sumber itu.

Dikatakan, data ini belum termasuk mega proyek yang sama di Pulau Seram, yang saat ini dalam proses tender yang bakal segera diumumkan dalam waktu dekat. Hanya saja, bertepatan dengan ditangkapnya Abdul Khoir, maka pengumuman pemenang tender “akal-kalan” ini dipending.

Mendapatkan mega proyek di Tenggara Raya sebanyak itu, tampaknya belum dirasa cukup. Tak pelak, ke-tiganya langsung urunan untuk berburu paket lagi proyek di APBNP 2016, melalui Damayanti Anggota DPR RI. Alhasil, belum berujung untung, Abdul Khoir sang “eksekutor” keburu ditangkap KPK bersama Damayanti dan dua stafnya dalam operasi tangkap tangan (OTT), KPK, pekan lalu.

Abdul Khoir sang juru loby sekaligus “eksekutor” proyek APBN di Balai Jalan dan Jembatan, Maluku dan Maluku Utara ditangkap, dua pengusaha “A” mulai dirundung “ketakutan.” “Bukan tidak mungkin bila KPK melakukan pengembangan dan pengeledahan di Kantor PT Windu Tunggal Utama, dua pengusaha ini bisa terseret,” ungkap sumber Kabar Timur di Kantor Balai Jalan dan Jembatan Maluku.

Apalagi, kata dia, bila benang merah ini dikait-kaitkan dengan proses tender sejumlah paket proyek APBN 2016 yang telah dimenangkan ketiga pengusaha ini bisa saja dibatalkan. “Kita tunggu saja, action KPK dalam membongkar skandal suap dalam proyek-proyek APBN di Balai Jalan dan



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Jembatan Maluku, pasti bakal banyak yang terseret. Termasuk juga Kepala Balai Amran Mustari,” ungkap dia.

Sementara itu, salah satu pengusaha asal Maluku memberikan apresiasi atas kerja KPK yang telah membongkar skandal suap pengusaha Maluku terhadap Anggota DPR RI. Dia mengatakan, upaya ‘kejahatan’ dengan menyuap Anggota DPR RI untuk menepoli proyek APBNP di Pulau Seram harus dibongkar.

“Amran Mustari Kepala Balai Jalan dan Jembatan Maluku dan Maluku Utara, tahu persis soal masalah ini. Dia—Amran---tidak bisa cuci tangan. Mereka semua berkomplot,” kata salah satu pengusaha asal Maluku kepada Kabar Timur, di Ambon, Minggu.

Menurutnya, media harus mengawal masalah ini sehingga tidak lagi ada menepoli proyek yang selama ini terjadi di Balai Jalan dan Jembatan, Maluku dan Maluku Utara. “Abdul Khoir ditangkap KPK bersama Damayanti poilitisi Senayan, menjadi bukti bahwa ada kejahatan suap yang selama ini hidup di Balai Jalan dan Jembatan itu,” katanya.

Karenanya, dia mengkritik, Kapala Balai Amran Mustari yang mengaku tidak tahu menahu soal “kejahatan” ini menyusul bos PT Windu Tunggal Utama ditangkap KPK. “Jangan kelabui publik, kejahatan ini sudah diketahui bersama. Bahkan, tender tiga pengusaha yang dikenal berinisial “A” pada paket proyek APBN 2016, tidak lepas dari permainan suap-menyuap itu,” tuding dia.

Dia sepakat bila, pengusutan KPK terkait penangkapan Abdul Khoir tidak berhenti disitu. Pasalnya, benang kusut ini harus diurai. Apalagi tangkap tangan KPK bersama bukti dana jumbo tidak ansih milik PT Windu Tunggal Utama.

“Dana itu, berasal dari hasil patungan pengusaha-pengusaha yang selama ini menguasai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pulau Seram. Istilahnya, uang kecil beli uang besar. Ini yang harus diungkap,” tudingnya.

Yang menarik, terungkap juga, bila mega proyek Rp 500 miliar APBN 2016, yang telah lolos tender dimenangkan, PT Windu Tunggal Utama, di Selwaru dan Larat, juga lolos dengan sistim yang sama, tapi lewat anggota DPR RI lain yang tugasnya di Badan Anggaran (Banggar).

“Anggota DPR RI sempat masuk Ambon beberapa kali, dari Dapil Sulawesi Selatan, asal Partai Beringin,” ungkap sumber di Kantor Balai Jalan itu. Lanjut dia, mega proyek jalan di Selwaru dan Larat, dalam tender dimenangkan PT Windu Tunggal Utama. Sedangkan, Tapa, Kisar, Wetar dan Moa, digarap atau dimenangkan duo pengusaha yang dikenal berinisial “A” yang juga partner Abdul Khoir.

“Total paket semua berjumlah tujuh. Modusnya sama menyuap anggota DPR RI. Tapi, untuk proyek yang dianggarkan APBN 2016 ini berjumlah tujuh paket ini, Trio “A” gunakan oknum anggota DPR RI yang bermarkas di Badan Anggaran,” sebutnya.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Menurutnya, data siapa sang anggota DPR RI di Badan Anggaran yang kerap digunakan Trio “A” untuk loloskan paket-paket jumbo proyek ratusan miliar di Balai Jalan dan Jembatan Maluku dan Maluku Utara sudah tidak asing lagi bagi kalangan pengusaha Jasa Konstruksi di Maluku.

“Dengan tertangkapnya Abdul Khoir, kejahatan ini harus segera diungkap. Tidak hanya untuk paket APBNP, tapi proyek APBN 2016, pun harus diungkap. Sebab, modus “kejahatan” sama dengan apa yang diungkap KPK itu,” bebernya.

Diberitakan sebelumnya, lembaga super body ini terus melakukan pendalaman pemeriksaan terhadap Damayanti, Abdul Khoir bos PT Windu Tunggal Utama dan dua tersangka lainnya. Inisial trio “A” yang disebut-sebut itu salah satunya Abdul Khoir. Kendati duo “A” lainnya, yang diduga ikut dalam patungan dana itu masih dirahasiakan.

“Setelah mengeledah ruang kerja Damayanti di DPR RI, penyidik KPK akan menuju Ambon di kantor PT Windu Tunggal Utama. Di Ambon KPK akan bertindak sama seperti yang dilakukan di ruang kerja Damayanti,” ungkap Pelaksana Harian Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati.

Tapi, kapan pengeledahan markas PT Windu Tunggal Utama, KPK menolak membocorkan rencana itu. “Ya tunggu saja. Pastinya, untuk memperkuat semua bukti pengeledahan itu akan dilakukan,” bebernya.

Dia mengatakan, tersangka Damayanti telah ditahan di Rutan KPK. Damayanti mendekam di rutan yang sama dengan seorang stafnya bernama Dessi A Edwin. Damayanti ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera).

Selain Damayanti, KPK juga menahan dua staf Damayanti, Julia Prasetyarini dan Dessi A Edwin serta Dirut PT Windu Tunggal Utama, Abdul Khoir yang juga menjadi tersangka kasus yang sama.

Yuyuk Andriati mengatakan, Damayanti ditahan di Rutan KPK. Damayanti mendekam di rutan yang sama dengan seorang stafnya Dessi A Edwin. “DWP (Damayanti Wisnu Putranti) dan DES (Dessi A Edwin) di Rutan Wanita KPK,” kata Yuyuk.

Sementara, staf Damayanti lainnya, Julia ditahan di Rumah Tahanan Polres Jakarta Selatan. Sedangkan Dirut PT Windu Tunggal Utama, Abdul Khoir ditahan di Rutan KPK. “AKH (Abdul Khoir) di Rutan KPK, dan Jul (Julia) di Rutan Polres Jakarta Selatan,” tambah Yuyuk.

Yuyuk menegaskan, pengusutan kasus ini tak berhenti dengan menetapkan Damayanti dan menahannya. KPK akan mengusut dan mengembangkan kasus ini, termasuk mengusut keterlibatan pihak lainnya. “Dugaan keterlibatan pihak lain masih akan ditelusuri, termasuk melalui pengembangan kasus ini,” kata Yuyuk.

Berdasar informasi, salah satu pihak yang tengah diincar KPK dalam kasus ini merupakan anggota DPR. Namun, wakil rakyat tersebut berbeda fraksi dengan Damayanti. Namun, usai diperiksa



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

penyidik dan akan menjalani masa penahanan, Damayanti memilih bungkam saat dicecar awak media mengenai keterlibatan pihak lain dalam kasus ini.

Sebagaimana diketahui, sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah ruang kerja anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Damayanti Wisnu Putranti, Jumat (15/1) siang. Ruang kerja Damayanti terletak di lantai 6, ruangan 0621, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, digeledak.

Pengeledahan itu dilakukan menyusul ditetapkannya Damayanti sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Pantauan di lokasi, proses pengeledahan tersebut berlangsung tertutup. Saat tiba, para penyidik KPK itu tampak dikawal empat polisi bersenjata lengkap.

Ruangan itu sebelumnya telah disegel dengan menggunakan pita berwarna merah hitam yang bertuliskan “KPK Line” sejak Kamis (14/1) siang. “Polisinya di luar jaga di depan ruangan. Ada empat orang, tiga bersenjata lengkap satu komandannya,” kata salah seorang petugas Pengamanan Dalam DPR yang enggan disebutkan namanya.

Menurut petugas itu, para penyidik KPK tiba sejak pukul 11.00 WIB. Mereka langsung masuk ke dalam ruangan Damayanti untuk mencari barang bukti lain. KPK menangkap Damayanti. Namun, Damayanti ternyata bukan satu-satunya anggota legislatif yang diduga terlibat dan dikejar lembaga anti rasuah itu.

Damayanti mengutus dua teman dekatnya, Julia Prasetyarini dan Dessy A Edwin, untuk bertemu dengan Bos PT Windhu Tunggal Utama (WTU) Abdul Khoir pada Selasa (12/1). Pertemuan dilakukan di kantor PT WTU di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Hari itu, Abdul berjanji akan memberikan uang senilai 99.000 dollar Singapura atau sebesar Rp 3,9 miliar, masing-masing untuk Damayanti, Julia, dan Dessy.

Uang itu merupakan bagian dari komitmen fee agar PT Windu mendapatkan proyek-proyek di bidang jasa konstruksi yang dibiayai dari dana aspirasi DPR di Pulau Seram, Provinsi Maluku. PT Windu memang mengincar sejumlah proyek jalan di provinsi itu yang dianggarkan dari dana aspirasi DPR dan dicairkan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Berdasarkan informasi Asisten Perencanaan Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional II Maluku Yade Trianto, untuk tahun 2016, di Wilayah II Maluku yang meliputi Pulau Seram akan ada 19 paket pekerjaan yang terdiri dari 14 jalan dan 5 jembatan. Proyek tersebut sedang dalam proses pelelangan.

Damayanti sengaja tak mau datang sendiri menemui Abdul. Dia mengutus temannya agar terkesan bukan dia yang menerima suap dari Abdul. Namun, setelah Julia dan Dessy menerima 99.000 dollar Singapura dari Abdul hari Selasa, Damayanti mengutus sopirnya datang ke rumah Julia pada Rabu dini hari untuk mengambil uang bagian Damayanti sebesar 33.000 dollar Singapura.

Pada Rabu itu, baik Abdul, Damayanti, Julia, maupun Dessy menjalani aktivitas seperti biasa. Mereka sama sekali tak menduga gerak-geriknya selama beberapa hari terakhir sebenarnya sudah



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

diintai KPK. Dessy bahkan asyik jalan-jalan di Pondok Indah Mall setelah mengantongi uang 33.000 dolar Singapura dari Abdul.

Setelah memastikan terjadi perpindahan uang dari Abdul ke tiga perempuan itu, tim KPK yang masih berada di lapangan langsung dibagi empat. Pukul 17.00, dua tim pertama bergerak bersamaan untuk menangkap Dessy dan Julia. Dessy ditangkap di Pondok Indah Mall, sedangkan Julia ditangkap di Tebet, Jakarta Selatan.

Dari dua perempuan itu, KPK menyita uang masing-masing 33.000 dollar Singapura. Tim ketiga kemudian memburu Abdul, yang berhasil ditangkap di kawasan Kebayoran, Jakarta Selatan. Tak berapa lama setelah menangkap Abdul, tim KPK yang menempel Damayanti pun meringkusnya di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, tak jauh dari rumahnya.

Damayanti tak berkutik setelah dari mulut sopirnya diketahui dia telah menerima uang 33.000 dollar Singapura. KPK telah menetapkan Damayanti, Julia, dan Dessy sebagai tersangka penerima suap.

Diberitakan sebelumnya, masih belum beres dugaan korupsi delapan paket proyek jalan yang bernilai ratusan miliar di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), yang ditangani Kejaksaan Agung, Bos PT Windu Tunggal Utama lebih awal diciduk KPK bersama politikus PDI-P, dalam operasi tangkap tangan (OTT), Rabu, 13 Januari 2016, malam.

Bos PT Windu bernama: Abdul Khoir ditangkap bersama Dessy A. Edwin, Julia Pristiani alias Uwi dan anggota DPR RI Komisi V dari PDIP Damyanti Wisnu yang diduga menerima suap untuk pelicin mega proyek jalan di Pulau Seram Maluku sepanjang 60 KM, di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, melalui Balai Jalan dan Jembatan Wilayah Maluku dan Maluku Utara yang dikomandoi Amran Mustari.

Amran Mustari dikonfirmasi Kabar Timur via telepon selulernya, tadi malam, terkait penangkapan itu, kaitannya dengan proyek di Pulau Seram? Amran mengaku, baru mengetahui dari media TV.

Ditanya apakah Kementerian PU dan Perumahan Rakyat telah menganggarkan proyek jalan lintas Seram Wilayah II? Dia mengaku, tidak tahu menahu. "Biasanya ada anggaran untuk jalan. Coba tanya ke Satkernya," aku Amran pura-pura bego.

Informasi di Balai Jalan dan Jembatan Wilayah Maluku dan Maluku Utara, proyek infrastruktur Jalan dan Jembatan di wilayah Seram II, saat ini dalam proses tender dengan jumlah paket sebanyak 19 paket, yang terdiri dari 15 paket jalan dan empat jembatan, yang totalnya mencapai ratusan miliar rupiah. "Dari 15 paket jalan total panjang mencapai 60 Kilo Meter (KM)," ujar sumber di Balai Jalan.

Amran Mustari sendiri ketika ditanya apakah mengetahui bila bos PT Windu Tunggal Utama Abdul Khoir ikut diciduk KPK? Lagi-lagi, Amran pura-pura bego mengaku, tidak tahu. "Saya tidak tahu, soal ada Abdul Khoir yang ikut diciduk," ujarnya.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Abdul Khoir dan politisi PDIP bersama dua rekannya itu, telah resmi ditetapkan lembaga super body sebagai tersangka, setelah dilakukan pemeriksaan selama 1x24 jam. “Mereka telah ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa secara intensif oleh penyidik KPK dan melalui proses gelar perkara,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo, kepada wartawan di Jakarta, Kamis, sore, kemarin.

Menurut Ketua KPK, Damayanti diduga menerima suap untuk pelicin proyek di Kemen PU Pera. “Kalau tahunnya ini Tahun Anggaran 2016. Perkiraannya adalah proyek Kementerian PU Pera,” terang Agus. **(KTS/KTM)**



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Jumat, 29 Januari 2016 06:00

Putra MTB-MBD Bakal Direkrut Bangun Kilang Masela



AMBON - Ditengah perdebatan soal pengelolaan Migas Masela di darat atau dilaut, Satuan Kerja Khusus Migas (SKK Migas) justeru menawarkan pekerjaan bagi putra Maluku Tenggara Barat dan Maluku Barat Daya bekerja di Migas Masela.

Kepala SKK Migas, Amin Sunarjadi mengatakan, putra MBD dan MTB akan dipertimbangkan untuk direkrut bekerja di Blok Masela. "Putra MBD-MTB mesti disiapkan untuk bekerja di kilang Masela. Jadi mereka harus disiapkan sejak awal," kata Sunarjadi ketika berbincang-bincang dengan awak media saat SKK Migas dan Unpatti menggelar Focus Group Discussion Multiplier Effect Proyek Pengembangan Lapangan Masela di lantai IV gedung Rektorat Unpatti, Senin (25/1)

Dia mengaku, pengeboran Migas Masela yang dimulai 2019 mendatang butuh tenaga kerja yang tidak sedikit. "Nah, kalau mereka (putra MTB-MBD) ingin kerja mesti disiapkan sejak awal. Misalnya, Sekolah mereka dimana. Itu juga harus diperhatikan. Apakah mereka tamatan sarjana atau SMA saja," ingatnya.

Sebelumnya, salah satu tokoh masyarakat MTB, Nicko Ngeljaratan berharap, putra putri daerah penghasil Migas terbesar di Asia Tenggara itu di sekolahkan di sektor Migas. "Saatnya anak-anak MBD-MTB dilibatkan dalam eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas blok Masela. Mereka harus menjadi subjek dan objek. APBD dua kabupaten itu dan APBD Maluku mesti mengalokasikan bagi anak-anak MTB-MBD untuk sekolah Migas," usul salah satu tokoh masyarakat MTB, Nicko Ngeljaratan beberapa waktu lalu.

Tak hanya itu, dia berharap, putra putri didua daerah itu dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat menggunakan atribut adat setempat. "Jangan anak-anak MTB-MBD ikut demo di DPRD Maluku beberapa waktu lalu pakai kain berang. Itu tidak bisa. Kita mesti pakai kain tenun. Mari kita bicara kita punya kepentingan. Jangan orang lain bicara kita punya kepentingan. Ingat



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

orang MBD bisa pimpin NASA. Ingat kita punya sumber daya manusia disektor Migas sekitar 80 orang, jika negara percaya kita,’’terangnya.

Soal tarik menarik pengelolaan Migas Masela, dengan sistim on shore (pengelolaan didarat) atau off shore (pengelolaan di laut), dia berharap, tidak dipolemikan.’’ Jangan polimik on Shore atau of Shore. Pemda dan seluruh komponen bangsa didaerah ini mesti mendesak Inpex sebagai pemegang tender mensosialisasikan plus minus dari on Shore atau of Shore. Ini agar masyarakat paham,’’harapnya.

Dia kuatirkan, persoalan Masela seperti PT Freport yang mengeruk emas di Papua. Dia mengaku, Freport hanya menguntungkan kalangan atas. ‘’Sementara masyarakat tidak menikmati secara baik sehingga masyarakat Papua masih miskin. Nah, Migas Masela mesti diantisipasi secara baik agar berimplikasi bagi masyarakat. Jangan kasus Freeport terjadi di Maluku ,’’ingatnya. (KTM)



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Jumat, 29 Januari 2016 06:00

Kondisi Jalan Trans Yamdena Banyak Berlubang

AMBON - Kondisi ruas jalan trans Yamdena, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) yang baru selesai dikerjakan ternyata memiliki kualitas kurang baik sebab sudah terkelupas dan berlubang.

“Saya memberikan catatan keras terhadap masalah ini karena banyak kondisi jalannya sudah terkelupas dan banyak sekali kolam-kolam pada beberapa lokasi di jalan trans Yamdena, apalagi sekarang memasuki musim hujan,” kata anggota DPRD Maluku (F-Golkar), Dharma Oratmangun di Ambon, Kamis.

Sehingga pihak Balai Jalan Nasional maupun komisi C DPRD provinsi yang memiliki tugas pengawasan diharapkan bisa memberikan perhatian serius terhadap persoalan infrastruktur ini yang kualitasnya diragukan.

“Kondisi jalan yang rusak bisa terlihat pada jalur menuju Arui, ke arah Siwaan dan turun lagi ke Sanleat, banyak sekali jalan-jalan yang mengelupas hotmixnya akibat diduga lapisan aspalnya sangat tipis,” tegasnya.

Kerusakan ini bisa saja disebabkan banyak faktor lain, tetapi yang terpenting adalah tingkat ketebalan Hotmix yang diduga tidak sesuai spek dalam kontrak kerja oleh pihak perusahaan. “Saya tidak menuduh, tetapi minta pengawasan lebih ketat apakah sesuai spek atau tidak,” tandasnya.

Dia juga mengakui ada informasi langsung dari teman-teman di DPRD Kabupaten MTB bahwa pembangunan jalan di sana sama sekali tidak membayar material galian C sudah lebih dari tujuh tahun.

Pembangunan infrastruktur jalan itu ditangani PT. Windu dan beberapa perusahaan lainnya, namun selama ini tidak ada kontribusi galian C ke kas daerah. “Sehingga masalah ini perlu disoroti, termasuk KPK diharapkan melacak itu. Kalau pun dibayar, tetapi kepada siapa uangnya diberikan karena PAD dari galian C tidak pernah ada,” akui Dharma.

Kemudian kalau tidak dibayarkan galian C harus dijelaskan apa alasannya, karena cara seperti ini merugikan pendapatan negara atau daerah. Jadi kualitas jalan perlu diawasi ulang apakah sesuai spek atau tidak ketebalan hotmixnya, kemudian bantalan jalan di sisi kiri dan kanan serta saluran pembuangan air harus diperhartikan sungguh-sungguh. (AN/KTP)